

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang wajib terpenuhi, pemenuhan pangan begitu penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk tercukupi kebutuhannya. Pangan merupakan bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang dapat dimanfaatkan agar mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Pemenuhan pangan bagi masyarakat dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebagai komponen membangun sumber daya manusia yang berkualitas (Ariani, 2015). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah menjadi keharusan, setiap negara dituntut dapat meningkatkan kualitas manusianya agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara lainnya.

Ketercukupan konsumsi pangan dapat meningkatkan kualitas fisik dan kecerdasan seseorang khususnya pada masa anak-anak, sebaliknya jika konsumsi pangan tidak dapat tercukupi, baik kuantitas maupun kualitas dan terjadi terus menerus akan memungkinkan menjadi penyebab penurunan *intelligence quotient* atau yang sering disebut IQ (Hafsah, 2006). Padahal kecerdasan anak-anak di suatu negara sangat penting untuk menjauhkannya dari keterbelakangan. Hal ini menunjukkan bahwa pangan mempunyai pengaruh yang sangat vital bagi kemajuan sebuah negara.

Pemerintah Indonesia berkomitmen tentang masalah pangan bagi masyarakat yang dijelaskan dalam UU No. 18 tahun 2012 mengenai pangan, mendefinisikan ketahanan pangan (*food security*) sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Komitmen tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwa mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada tingkat nasional, namun harus diwujudkan pada setiap wilayah, rumah tangga dan individu untuk mendapatkan haknya tanpa terkecuali.

Ketahanan pangan suatu wilayah tidak bergantung sepenuhnya pada ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Ketersediaan pangan yang melimpah akan tidak ada artinya, bila penduduk belum mampu menjangkau kebutuhan pangannya. Kondisi di daerah masih banyak masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, hal ini akan mempengaruhi rumah tangga/individu untuk sulit mendapatkan bahan pangan yang cukup. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli, sehingga kondisi tersebut menyebabkan masyarakat dengan penghasilan rendah, rentan pada terjadinya kerawanan pangan.

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan kemampuan mendapatkan pangan yang cukup. Masalah kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya kelaparan yang terjadi secara terus menerus. Fenomena kelaparan telah lama terjadi di dunia, pada KTT pangan FAO di Roma tahun 1996 para pemimpin dunia bertekad akan mengurangi kelaparan dari 840 juta orang menjadi 400 juta

orang. Kemudian dipertegas lagi komitmen tersebut dalam *Millennium Development Goal* (MDG) tahun 2000 untuk melawan kemiskinan dan kelaparan (Nainggolan, 2006). Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencapai ketahanan pangan melalui instrumen-instrumennya untuk mempengaruhi penduduk miskin agar jauh dari kelaparan.

Pada era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakannya sendiri dengan berpedoman pada kebijakan nasional. Kebijakan tiap daerah berbeda-beda dalam menciptakan ketahanan pangan dengan melihat keunggulan yang dimiliki, kebijakan yang tepat akan menimbulkan kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ketahanan pangan harus memperhatikan kondisi masing-masing wilayah pada tingkat pengambil kebijakan paling rendah dalam hal ini pemerintah desa. Perlunya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah (Dewan Ketahanan Pangan, 2015). Luas wilayahnya sebesar 78.864,16 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 722.026 jiwa. Wilayah administrasi Kabupaten Batang terbagi atas 15 kecamatan dan terdapat 248 desa. Kondisi wilayahnya sendiri terbagi atas tiga bagian yaitu daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Kondisi wilayah tersebut sangat menguntungkan untuk pengembangan pertanian. Berbagai komoditas pertanian dapat dikembangkan termasuk juga tanaman pangan. Luas lahan pertanian di

Kabupaten Batang yang digunakan untuk tanaman pangan mencapai 50.816 ha (BPS Kabupaten Batang, 2016).

Keadaan pertanian yang potensial tersebut tidak berpengaruh besar terhadap nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) dan kualitas konsumsi yang beragam diukur dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Penduduk di Kabupaten Batang tercatat masih memiliki masalah dalam hal pemenuhan AKE yang berada pada angka 1.745,7 kkal/kapita/hari. Hal ini masih dibawah standar yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Sementara pada keseimbangan gizi dan keberagaman pangan hanya pada skor 79,7 masih belum mencapai target PPH yang dianjurkan sebesar 100 (Bappeda, 2013)

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang masih dihadapi pemerintah untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah, sehingga penurunan penduduk miskin menjadi program prioritas yang harus dilakukan. Selama tahun 2010-2014 penurunan penduduk miskin di Kabupaten Batang setiap tahun sebesar 0,88 persen, namun jumlah penduduk miskin tahun 2014 masih cukup besar mencapai 82.120 orang setara 11,13 persen dari total penduduk (BPS Kabupaten Batang, 2016), dengan demikian kemiskinan akan menjadikan penduduk sulit mendapatkan hak dasarnya yaitu pangan.

Penduduk miskin di Kabupaten Batang banyak tersebar di wilayah dataran tinggi dan wilayah rendah, wilayah tersebut cenderung mayoritas bermata pencarian sebagai buruh tani, petani dan nelayan. Kabupaten Batang memiliki daerah dataran tinggi dengan persentase penduduk miskin lebih dari 50 persen

yaitu Kecamatan Blado dan Kecamatan Reban, sedangkan untuk daerah pesisir persentase penduduk miskin berkisar antara 30 sampai 50 persen (Marfai. *et al*, 2011). Ada lima kecamatan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Batang, yaitu Kecamatan Batang, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Subah dan Kecamatan Tulis.

Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melihat ketahanan pangan berdasarkan aspek akses pangan pada tingkat desa di Kabupaten Batang, setelah mengidentifikasi ketahanan pangan berdasarkan aspek pangan. Penelitian ini akan melihat sebaran dengan melakukan pemetaan ketahanan pangan pada tingkat desa di Kabupaten Batang yang sudah pada keadaan tahan pangan atau rawan pangan.

## **B. Tujuan**

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik wilayah berdasarkan indikator aspek akses pangan.
2. Menganalisis kondisi ketahanan pangan berdasarkan aspek akses pangan pada tingkat desa di Kabupaten Batang.

## **C. Kegunaan**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Membuka wawasan peneliti tentang ketahanan pangan wilayah.
2. Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah tentang masalah ketahanan pangan berdasarkan akses sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan yang sesuai kondisi tiap desa.